

Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Untuk Pengembangan UMKM Di Desa Gendoh, Banyuwangi

Khrisna Adriano Firdaus¹, Dimas Imaniar², Safrieta Jatu Permatasari³.

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia

Corresponding Author: safrieta@untag-banyuwangi.ac.id

ARTICLE INFO

Kata kunci: Pemerintah Desa, Pelayanan Publik, Pengembangan UMKM, Tata Kelola yang Baik, Kabupaten Banyuwangi

Menerima : 14 Januari 2025

Direvisi : 19 Januari 2025

Diterima : 23 Januari 2025

©2025 Firdaus, Imaniar, Permatasari: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah ketentuan

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Desa Gendoh dalam pelayanan publik yang diarahkan pada pengembangan UMKM, dengan fokus pada identifikasi tantangan dan peluang yang ada. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan: Bagaimana pemerintah desa dapat meningkatkan pelayanan publiknya untuk mendukung UMKM dengan lebih baik? Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan dari pemerintah desa, staf desa, dan pelaku UMKM, menggunakan teknik purposive dan snowball sampling. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah membuat kemajuan signifikan dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pelayanan publik. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterlibatan masyarakat yang terbatas dan keterbatasan sumber daya. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dengan menyoroti pentingnya prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tingkat desa dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan UMKM. Kesimpulannya, meskipun penelitian ini menunjukkan dampak positif dari inisiatif pemerintah desa terhadap pengembangan UMKM, penelitian ini juga menekankan perlunya keterlibatan masyarakat yang lebih inklusif dan optimalisasi sumber daya secara strategis. Rekomendasi untuk penelitian mendatang mencakup pemeriksaan dampak jangka panjang digitalisasi terhadap pertumbuhan UMKM dan eksplorasi strategi kolaborasi pemangku kepentingan yang lebih efektif.

PENDAHULUAN

Sebagai entitas pemerintahan terendah, pemerintah desa bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa optimalisasi kinerja pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program yang berdampak pada sektor UMKM (Ardelia & Pradana, 2022). Pemerintah desa tidak hanya bertugas melaksanakan kebijakan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan pelaku UMKM dengan akses pelatihan, pemasaran, dan pembiayaan.

Meski memiliki potensi besar, implementasi kebijakan publik di tingkat desa menghadapi berbagai tantangan. Sumarsono et al. (2022) mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya komunikasi yang efektif, keterbatasan sumber daya, disposisi birokrasi, dan struktur organisasi yang kaku. Dalam konteks Desa Gendoh, penting untuk memahami bagaimana tantangan-tantangan ini memengaruhi efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelaku UMKM. Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi kebijakan yang lebih baik.

Kualitas pelayanan publik merupakan aspek kunci dalam mendukung pengembangan UMKM. Lailiyah (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi desa dapat mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan transparansi, sehingga memberikan manfaat langsung bagi pelaku UMKM. Dengan pelayanan yang lebih berkualitas, pelaku UMKM akan lebih termotivasi untuk mengembangkan usaha mereka, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perekonomian desa secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Wicaksana (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. Dalam konteks Desa Gendoh, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah desa dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam menentukan arah kebijakan dan program yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Dalam konteks sosial saat ini, UMKM menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Mandasari et al., 2019). Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terhadap modal, pemasaran, dan teknologi. Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang efektif untuk mendukung pengembangan UMKM sangatlah penting.

Faktor kelembagaan dan organisasi memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya menjadi tantangan utama (Muizu, 2023). Dalam konteks ini, pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan, baik melalui kebijakan yang memfasilitasi akses modal maupun program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.

Selain itu, digitalisasi menjadi isu penting yang harus dihadapi oleh pemerintah desa dan pelaku UMKM. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, UMKM dituntut untuk beradaptasi agar tetap kompetitif. Penelitian oleh Hendarmin menyoroti pentingnya pengembangan branding dan identitas bisnis untuk UMKM agar dapat dikenal di pasar yang lebih luas (Hendarmin, 2024). Dalam hal ini, pemerintah desa perlu berperan dalam memberikan pelatihan dan akses informasi mengenai pemasaran digital, sehingga pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform online untuk memperluas jangkauan pasar mereka.

Dampak sosial dari pengembangan UMKM juga tidak dapat diabaikan. UMKM berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian oleh Anas menunjukkan bahwa praktik ekonomi komunitas berbasis desa dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih berpihak pada ekonomi lokal dan berkelanjutan (Anas, 2023). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan strategi yang inklusif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan UMKM, sehingga kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan UMKM juga menjadi isu penting. Penelitian oleh Tohir menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam mendorong pengembangan UMKM di desa wisata sangat signifikan, terutama dalam hal fasilitasi pelatihan dan pendampingan (Tohir, 2023). Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa dapat menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pengembangan ekonomi lokal. Hal ini akan berdampak positif pada keberlanjutan program-program yang diimplementasikan.

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan publik di tingkat desa. Penelitian oleh Bachtiar mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Bachtiar, 2019). Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatnya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelaku UMKM.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pemerintah desa dalam pelayanan publik untuk pengembangan UMKM di Desa Gendoh, Banyuwangi. Dengan memahami tantangan dan peluang yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Penelitian ini juga akan memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah desa dapat beradaptasi dengan isu-isu terkini yang mempengaruhi pengembangan UMKM, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Latar belakang penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam pelayanan publik untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Gendoh, Banyuwangi. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM telah menjadi fokus utama dalam pengembangan ekonomi lokal di Indonesia, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, meskipun banyak penelitian yang membahas

tentang UMKM, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana pemerintah desa dapat secara efektif berperan dalam meningkatkan pelayanan publik yang mendukung pengembangan UMKM. Penelitian oleh Maulana et al. menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor UMKM sangat penting, tetapi tidak banyak yang mengkaji secara spesifik bagaimana implementasi kebijakan di tingkat desa dapat mempengaruhi pengembangan UMKM (Maulana et al., 2021).

Salah satu isu yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berkembang. Penelitian oleh Rizal mengungkapkan bahwa sistem informasi desa yang baik dapat meningkatkan pelayanan publik dan memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat (Rizal, 2023). Namun, di banyak desa, termasuk Desa Gendoh, sistem informasi yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik untuk mendukung pengembangan UMKM.

Selain itu, penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Iswari menunjukkan bahwa integrasi UMKM dengan sektor pariwisata dapat menciptakan sinergi positif bagi perekonomian lokal (Iswari, 2023). Namun, belum ada kajian yang mendalam mengenai bagaimana pemerintah desa dapat memfasilitasi integrasi ini melalui kebijakan dan program yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi peran pemerintah desa dalam menciptakan ekosistem yang mendukung kolaborasi antara UMKM dan sektor pariwisata di Desa Gendoh.

Kualitas pelayanan publik juga menjadi faktor penting dalam pengembangan UMKM. Penelitian oleh Rahayu *et al.* menyoroti adanya ketidakpastian dalam waktu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, yang dapat menghambat pertumbuhan UMKM (Rahayu et al., 2022). Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisis bagaimana pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelaku UMKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan tersebut.

Selanjutnya, komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat juga menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan publik. Penelitian oleh Taufiq et al. menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar di desa (Taufiq et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah desa dapat membangun saluran komunikasi yang efektif dengan pelaku UMKM untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran pemerintah desa dalam pelayanan publik untuk pengembangan UMKM di Desa Gendoh, Banyuwangi, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Dengan mengisi kesenjangan yang ada dalam penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan UMKM. Manfaat dari penelitian ini tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintah desa dan pelaku UMKM, tetapi juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan

ekonomi lokal yang berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam rangka memahami peran pemerintah desa dalam pelayanan publik untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Gendoh Banyuwangi, penting untuk merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Berikut adalah rangkuman dari tiga penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema ini, antara lain :

Pertama, penelitian Muizu (2023) yang berjudul "Aspek Kelembagaan dan Organisasi dalam Pengembangan UMKM Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung". Berfokus pada aspek kelembagaan dan organisasi dalam pengembangan UMKM di Desa Cileunyi Wetan. Pemahaman tentang kelembagaan sangat penting karena struktur yang kuat dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha UMKM itu sendiri. Hasil Penelitian: Temuan utama menunjukkan bahwa komunitas yang mendukung UMKM memiliki peran krusial dalam memberikan akses sumber daya dan informasi pasar. Selain itu, pembentukan asosiasi dan koperasi dianjurkan untuk memperkuat jaringan antar pelaku usaha. Keterikatan sosial dalam bentuk komunitas juga menjadi faktor kunci dalam mengembangkan strategi pemasaran dan distribusi.

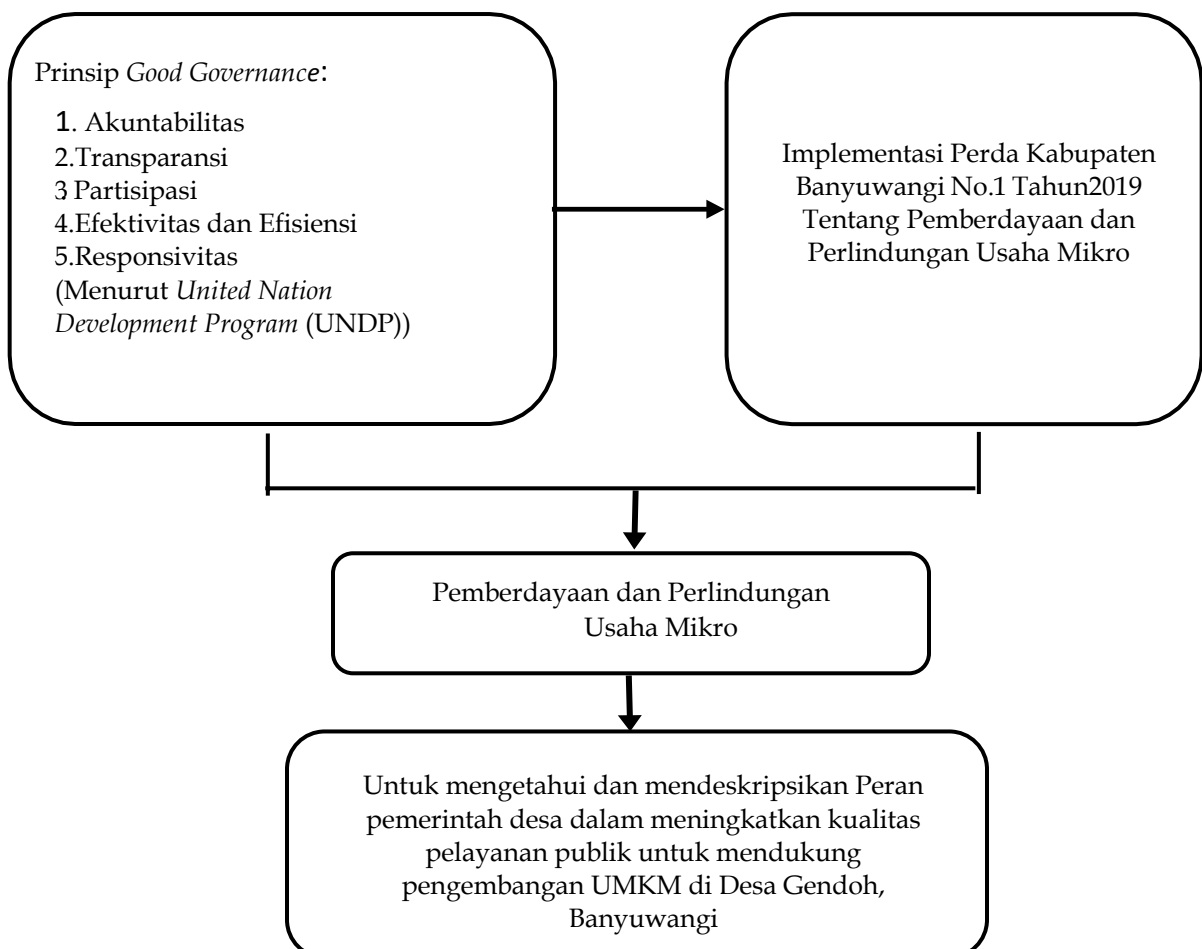
Kedua, penelitian Iswanto (2021) yang berjudul "Peran Kepala Desa dalam Memberikan Pelayanan Prima di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini menganalisis bagaimana kepala desa menjalankan peran mereka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di Desa Soket Laok. Fokus utama adalah pada individu (kepala desa) dan dampaknya terhadap masyarakat. Metode: Menggunakan observasi dan wawancara dengan kepala desa serta warga desa, penelitian ini menciptakan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pelayanan dilakukan dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan publik yang baik diakui mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sekaligus mendorong partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk pengembangan UMKM.

Ketiga: penelitian Hendarmin (2024) yang berjudul "Pengembangan Branding dan Identitas Bisnis untuk UMKM Desa Petanang". Fokus penelitian ini adalah pada pengembangan branding dan identitas bisnis untuk UMKM di Desa Petanang, yang merupakan aspek penting dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar. Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam potensi lokal dan strategi branding yang dapat diterapkan oleh UMKM. Hasil Penelitian: Penelitian ini menemukan bahwa pemanfaatan potensi lokal serta perumusan pesan branding yang kuat dapat meningkatkan daya tarik produk UMKM. Dengan identitas yang jelas, produk dapat bersaing lebih baik di pasar dan menarik perhatian konsumen.

Dari ketiga penelitian tersebut menunjukkan kesamaan dalam menyoroti

pentingnya pengembangan UMKM dan peran pemerintah desa. Namun, pendekatannya bervariasi: Muizu lebih menyentuh aspek kelembagaan dan organisasi, Iswanto fokus pada peran individu (kepala desa) dalam pelayanan publik, Hendarmin menekankan strategi branding dan identitas bisnis sebagai kunci untuk daya saing. Kesenjangan dalam Penelitian Terdahulu Konteks Lokal yang Berbeda: Penelitian sebelumnya tidak secara eksplisit membahas interaksi antara pemerintah desa dan UMKM di konteks pelayanan publik. Dampak Kebijakan: Kurangnya analisis mengenai dampak kebijakan pemerintah desa terhadap pengembangan UMKM, terutama dalam konteks spesifik Desa Gendoh, Banyuwangi. Tantangan Pelayanan: Penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi indikator tantangan yang dihadapi pemerintah desa, seperti keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, dalam menyediakan pelayanan yang optimal untuk UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dengan: Menyediakan analisis mendalam mengenai interaksi antara pemerintah desa dan UMKM, mengidentifikasi cara optimal untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah desa dalam mendukung UMKM, menggali tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya. Secara keseluruhan, penelitian ini berpotensi memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pemerintah desa dan UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal.

Kerangka Teori Penelitian



METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena dianggap lebih sesuai untuk memahami fenomena yang sedang terjadi saat ini. Pertimbangan di balik pemilihan lokasi atau objek penelitian di Kantor Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, adalah karena tempat tersebut menunjukkan peran pemerintah desa sebagai fasilitator yang diwujudkan melalui kreativitas dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti untuk informan meliputi purposive sampling dan snowball sampling. Menurut Yusuf (2015), "purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sumber informasi berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu." Dalam menganalisis data, seperti yang dinyatakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014:31-33), terdapat tiga aktivitas yang berlangsung secara bersamaan dalam analisis data kualitatif. Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah: Data Condensation (reduksi data), Data Display (penyajian data), dan Conclusion Drawing/Verifications (penarikan kesimpulan/verifikasi).

HASIL

Berikut adalah hasil wawancara dalam bentuk tabel :

<i>Aspek</i>	<i>Pemerintah Desa</i>	<i>Masyarakat Pelaku UMKM (yang mendapat pelatihan dan pendampingan)</i>
<i>Akuntabilitas</i>	• Pemerintah desa untuk merancang program-program yang akuntabel dan transparan. • memiliki format standar untuk laporan yang harus diisi setiap kali program selesai dilaksanakan	<i>Mengetahui bahwa ada laporan pertanggungjawaban terkait program pelatihan dan pendampingan yang diadakan. Namun, saya belum melihat secara langsung isi laporan tersebut.</i>
<i>Transparansi</i>	• Setelah dievaluasi dipasang banner untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa UMKM yang dibina sekarang di titik-titik mana itu sudah tercantum. • Tantangan terbesar adalah menjangkau masyarakat yang tidak memiliki akses ke media digital.	<i>Cukup mendapatkan informasi tentang program, meskipun kadang ada beberapa hal yang tidak dijelaskan dengan rinci</i>
<i>Partisipasi</i>	• Mengundang perwakilan masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap program • Memiliki kotak saran dan juga forum diskusi untuk	• Sedikit dilibatkan dalam perencanaan program, tetapi tidak secara langsung. • Ada kesempatan untuk

	<i>mendengarkan masukan</i>	<i>memberikan masukan untuk meningkatkan program ke depannya</i>
<i>Efektivitas dan Efisiensi</i>	• Untuk mengukur keberhasilan yang bisa disaksikan sendiri, contoh pada saat panen (UMKM) pertanian • Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan yang kami hadapi	• Program pelatihan dan pendampingan yang saya ikuti memberikan manfaat sesuai harapan, terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. • Pelaksanaan program umumnya berlangsung tepat waktu dan sesuai rencana, meskipun ada beberapa sesi yang terlambat.
<i>Responsivitas</i>	• Terbuka terhadap masukan dari masyarakat dan selalu ada evaluasi dan bisa ditindaklanjuti • Memiliki jalur komunikasi yang cepat untuk menangani keluhan dan mengadakan pertemuan khusus jika diperlukan • Merancang program bantuan darurat untuk pelaku UMKM yang terdampak situasi tertentu.	• pemerintah desa cukup responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, meskipun terkadang masih ada hal-hal yang perlu perhatian lebih. • Pemerintah desa berusaha memahami dan mendengarkan kebutuhan kami, tetapi komunikasi terkadang bisa lebih baik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan dari pemerintah desa, staf desa, dan masyarakat pelaku UMKM di Desa Gendoh Banyuwangi, hasil penelitian dianalisis dengan menghubungkan temuan terhadap teori Good Governance (UNDP) dan implementasi Perda Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2019. Berikut ini adalah analisis yang mengintegrasikan hasil temuan dan teori/studi sebelumnya:

1. Akuntabilitas

Pemerintah Desa Gendoh melaksanakan evaluasi rutin tiga bulan sekali terhadap program UMKM. Laporan pertanggungjawaban dilakukan melalui pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan BUMDes. Transparansi terkait hasil evaluasi juga disampaikan kepada masyarakat melalui media publik, seperti banner informasi. Prinsip akuntabilitas UNDP menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan dan program yang dibuatnya. Temuan ini sejalan dengan pendapat Ramadhan (2024) yang menekankan bahwa akuntabilitas adalah elemen kunci dalam meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun pemerintah desa menunjukkan akuntabilitas yang baik dalam pelaporan program, ada ruang untuk meningkatkan penyampaian laporan yang lebih langsung kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif warga.

2. Transparansi

Informasi mengenai program UMKM disampaikan melalui sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah desa menggunakan media digital seperti program "Smart Kampung" untuk menyediakan informasi yang relevan, termasuk data tentang kondisi pasar dan pemasaran digital. UNDP menyebut transparansi sebagai dasar untuk memastikan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan publik. Hal ini diperkuat oleh Apriliani et al. (2021), yang menyoroti pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi. Penggunaan teknologi digital di Desa Gendoh menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung transparansi. Namun, hambatan seperti akses terbatas ke media digital di kalangan masyarakat dapat memengaruhi efektivitas penyampaian informasi.

3. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam program UMKM terlihat melalui forum-forum diskusi, seperti LPMD dan BPD. Namun, sebagian masyarakat merasa kurang terlibat langsung dalam tahap perencanaan program. Prinsip partisipasi UNDP menekankan pentingnya masyarakat dalam pengambilan keputusan. Studi Wulandari (2018) juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mendorong keberhasilan program berbasis lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah menyediakan mekanisme partisipasi, pelibatan masyarakat dapat ditingkatkan lebih jauh, terutama pada tahap awal perencanaan kebijakan.

4. Efektivitas dan Efisiensi

Program pelatihan dan pendampingan UMKM telah memberikan manfaat signifikan, terutama dalam pengembangan keterampilan pelaku UMKM. Namun, keberhasilan program masih bervariasi, dengan beberapa peserta memerlukan pembinaan lanjutan. UNDP menyatakan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Hal ini didukung oleh Rahmawati & Yusuf (2021), yang menekankan pentingnya evaluasi untuk memastikan efektivitas program. Keberhasilan program yang bervariasi menunjukkan perlunya strategi khusus untuk mendukung UMKM yang masih mengalami kendala. Audit dan pemantauan yang lebih terarah dapat membantu meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan.

5. Responsivitas

Pemerintah desa merespons masukan masyarakat dengan menyesuaikan kebijakan berdasarkan kebutuhan yang berkembang. Pelatihan berbasis teknologi dan inovasi pertanian juga diperkenalkan untuk menjawab tantangan masyarakat. Prinsip responsivitas UNDP menekankan bahwa pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan

dengan studi Rohayatin et al. (2018), yang menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan dalam pelayanan publik. Responsivitas yang tinggi terhadap masukan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mengadopsi kebijakan adaptif. Namun, diperlukan langkah untuk mempercepat pengambilan keputusan agar kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera ditangani.

Implementasi Perda Banyuwangi No.1 Tahun 2019

Pemerintah desa telah mengintegrasikan implementasi Perda No.1 Tahun 2019 dengan program-program UMKM, termasuk pelatihan, pendampingan, dan pemberian akses ke pemasaran digital. Namun, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia masih menjadi hambatan. Implementasi perda terkait pemberdayaan UMKM sejalan dengan temuan Kurniawan & Nugroho (2020), yang menyebutkan bahwa regulasi daerah memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi lokal. Perda tersebut telah menjadi kerangka yang relevan untuk pemberdayaan UMKM. Namun, pemerintah desa perlu mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mendorong sinergi dengan dinas terkait untuk mengatasi keterbatasan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini mendukung prinsip Good Governance (UNDP) dan implementasi Perda Banyuwangi No.1 Tahun 2019. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya untuk menjalankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan publik untuk pengembangan UMKM. Namun, terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian, seperti keterlibatan masyarakat yang lebih inklusif dan peningkatan efisiensi program. Hasil ini juga memperluas studi sebelumnya dengan memberikan gambaran implementasi Good Governance di tingkat desa, khususnya dalam konteks pemberdayaan UMKM.

Saran

1. Keterlibatan Masyarakat yang Lebih Inklusif

- a. Peningkatan Forum Partisipasi: Pemerintah desa dapat menyelenggarakan forum musyawarah khusus untuk UMKM secara berkala agar masyarakat, terutama pelaku UMKM, dapat menyampaikan aspirasi, ide, dan masukan.
- b. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Pemerintah desa perlu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan program UMKM melalui sosialisasi, pelatihan, dan media informasi lokal.
- c. Pelibatan Komunitas UMKM: Libatkan komunitas UMKM secara langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Program

- a. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya: Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau lembaga swasta untuk

mendapatkan pendanaan tambahan, sehingga program UMKM dapat dijalankan dengan lebih baik.

- b. Monitoring dan Evaluasi Rutin: Lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program UMKM yang telah dijalankan untuk memastikan program tersebut memberikan dampak maksimal bagi pelaku usaha.
- c. Pelatihan Berkelanjutan: Selain pelatihan dasar, pemerintah desa perlu menyediakan program pendampingan lanjutan, khususnya terkait pemasaran digital, inovasi produk, dan pengelolaan keuangan usaha.

3. Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi

- a. Pengembangan Sistem Informasi Desa: Kembangkan sistem informasi berbasis digital yang transparan, seperti portal desa, untuk mempublikasikan laporan pertanggungjawaban, anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Laporan Terbuka untuk Masyarakat: Informasikan laporan program kepada masyarakat melalui media publik, seperti papan informasi desa, aplikasi desa pintar, atau grup media sosial komunitas UMKM.

4. Responsivitas terhadap Kebutuhan UMKM

- a. Adaptasi Program terhadap Kebutuhan Lokal: Pemerintah desa perlu melakukan survei atau diskusi awal dengan pelaku UMKM untuk memahami kebutuhan spesifik mereka, seperti modal usaha, pelatihan teknis, atau akses pasar.
- b. Bantuan yang Fleksibel: Sediakan skema bantuan yang mudah diakses oleh UMKM, baik dalam bentuk dana bergulir, peralatan produksi, atau subsidi pelatihan.

5. Peningkatan Sinergi dengan Perda Banyuwangi No.1 Tahun 2019

- a. Mendorong Kemitraan: Pemerintah desa dapat menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan atau sektor swasta untuk memberikan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar.

6. Penggunaan Teknologi Digital

- a. Sosialisasi Teknologi Digital: Lakukan pelatihan tentang penggunaan teknologi digital, seperti pemasaran melalui media sosial, pembuatan toko online, atau pengelolaan keuangan digital.

7. Solusi atas Tantangan Keterbatasan Sumber Daya

- a. Kolaborasi Lintas Desa: Desa Gendoh dapat menjalin kerja sama dengan desa lain untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan praktik terbaik dalam pemberdayaan UMKM.
- b. Pemberdayaan BUMDes: Optimalkan peran BUMDes dalam membantu memfasilitasi kebutuhan UMKM, seperti penyediaan modal usaha atau akses jaringan pasar.

REFERENSI

- Anas, A. (2023). *Penelitian Etnografi tentang Praktik Ekonomi Komunitas Berbasis Desa*. Mfc, 1(1), 41-49. <https://doi.org/10.61397/mfc.v1i1.17>
- Ardelia, L., & Pradana, G. (2022). *Inovasi Pelayanan E-Siap (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran) dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar*. Publika, 10(1), 309-322. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p309-322>
- Bachtiar, B. (2019). *Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan di Desa*. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 4(3), 45-57. <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.767>
- Hendarmin "Pengembangan Branding dan Identitas Bisnis untuk UMKM Desa Petanang" Jurdimas (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Royal (2024). doi:10.33330/jurdimas.v7i1.2803.
- Iswanto "Peran Kepala Desa dalam Memberikan Pelayanan Prima di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan" Jurnal Sosial Teknologi (2021). doi:10.59188/jurnalsostech.v1i3.41.
- Iswari, H. (2023). Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro di kampung glintung water street. ciastech, 6(1), 927. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5355>
- Kementerian Koperasi dan UKM, "Statistik UMKM di Indonesia."
- Lailiyah "Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance" Ristek jurnal riset inovasi dan teknologi kabupaten batang (2022) doi:10.55686/ristek.v6i2.112.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muizu "Aspek Kelembagaan dan Organisasi dalam Pengembangan UMKM Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung" (2023). doi:10.61296/jkbh.v5i1.89.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Usaha Mikro
- Rahayu, S., Haryanto, H., & Alzaytun, N. (2022). Standar pelayanan publik kecamatan pasar kemis kabupaten tangerang. Adi Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 1-7. <https://doi.org/10.34306/adimas.v3i1.724>
- Rizal, C. (2023). Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat. JUKTISI, 2(2), 433-438. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i2.134>
- Sumarsono et al. "Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang" Publisia jurnal ilmu administrasi publik (2022) doi:10.26905/pjiap.v7i2.8344.
- Taufiq, T., Maldun, S., & Nurkaidah, N. (2021). Komunikasi aparatur desa terhadap peningkatan pelayanan publik desa se-kecamatan tellulimpoe di kabupaten bone. Jurnal Paradigma Administrasi Negara, 2(2), 67-73. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.566>
- Tohir "Peran Pemerintah Desa Dalam Mendorong Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Desa Wisata" Jurnal Trias Politika (2023)

doi:10.33373/jtp.v7i2.5242

Wicaksana "Pelayanan Publik di Kabupaten Kolaka Timur: Tinjauan
Kualitatif pada Disdukcapil Kabupaten Kolaka Timur" Pamarenda
public administration and government journal (2023)

doi:10.52423/pamarenda.v3i2.45373.

Yusuf, M. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*.
Kencana Prenada Media Group.